

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengembangan teknologi nuklir merupakan langkah alternatif dalam mengatasi krisis sumber daya energi bagi Iran. Energi nuklir dinilai lebih murah, lebih luas dan lebih efektif jika dibandingkan dengan sumber energi lainnya.<sup>1</sup> Iran sebagai negara yang berdaulat mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Akan tetapi pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran mendapat tekanan dari dunia internasional terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Tekanan yang diterima oleh Iran tersebut memunculkan perdebatan yang menyatakan bahwa pengembangan nuklir Iran bertujuan untuk pembuatan senjata nuklir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah Iran dalam meyakinkan dunia internasional melalui IAEA terkait isu nuklir Iran.

*International Atomic Energy Agency* (IAEA) merupakan badan atom internasional yang khusus menangani negara-negara di dunia yang mengembangkan sektor nuklir. IAEA dibentuk pada tahun 1957 dan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pada tahun tersebut IAEA yang beranggotakan sebanyak 56 negara, salah satunya negara Iran. Negara Iran secara resmi bergabung dan menjadi anggota IAEA pada tahun 1957.<sup>2</sup> IAEA berkontribusi untuk menggalakkan perdamaian dunia, menjaga keamanan dunia, mencegah penyebaran senjata nuklir, dan mendukung serta membantu pengembangan teknologi nuklir untuk keperluan sipil.<sup>3</sup> Dalam menjalankan fungsinya, IAEA memiliki kewajiban untuk mengontrol negara-negara yang memiliki nuklir. Hal ini bertujuan

---

<sup>1</sup> Joseph J MacAvoy, *Nuclear Space and the Earth Environment: The Benefits, Dangers, and Legality of Nuclear Power and Propulsion in Outer Space*, *William & Mary Environmental Law and Policy Review*. 191 (2004). <http://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol29/iss1/6> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2014), 193.

<sup>2</sup> IAEA, *Member State*, Dalam <https://www.iaea.org/about/memberstates>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2016.

<sup>3</sup> HS Karyono, dkk, *Indonesia and Nuclear Iran's Issue* (Indonesia Institute of Sciences (LIPI), Jakarta: 2005), 25.

untuk memastikan agar pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan aman dan tidak mengarah kepada pengembangan senjata nuklir. Oleh karena itu IAEA berhak memeriksa pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh negara-negara anggota IAEA.<sup>4</sup>

Sebagai penunjang kegiatan IAEA dalam menjalankan tugasnya, maka dibuat suatu kesepakatan terhadap negara-negara pengembang energi nuklir yang tujuannya untuk menjaga keamanan dunia. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama *Non-Proliferation Treaty* (NPT). NPT ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968, yang dicetuskan oleh Irlandia melalui Menteri Luar Negerinya Frank Aiken. NPT mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan 40 negara lainnya. Hingga saat ini tercatat sebanyak 189 negara yang telah dan masih terikat dengan traktat tersebut. Dalam traktat tersebut negara-negara pengembang nuklir dikelompokkan menjadi dua yaitu *Nuclear Weapon States* (NWS) dan *Non-Nuclear Weapons States* (NNWS). NWS yaitu negara yang berhak memiliki senjata nuklir. Negara yang tergolong NWS terdapat sebanyak lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina. Sementara itu NNWS yaitu negara yang tidak berhak memiliki senjata nuklir, salah satunya adalah Iran. Negara yang tergolong dalam NNWS adalah negara yang meratifikasi traktat NPT selain NWS. Traktat NPT terdiri dari 11 pasal yang harus dipatuhi oleh negara anggota IAEA yang meratifikasi traktat NPT tersebut.<sup>5</sup>

Meskipun IAEA sebagai sebuah organisasi internasional, pengaruh dari negara *super power* tetap menjadi faktor dominan terhadap tindakan yang dilakukan oleh IAEA. Negara-negara yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan IAEA adalah Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Perancis dan Jerman atau dikenal juga dengan sebutan 5+1. Negara 5+1 tersebut berposisi sebagai *major player* dalam IAEA. Amerika Serikat sebagai bagian dari 5+1

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Muhammad Awan, *Recana Nuklir Israel: Membongkar Konspirasi Yahudi Menghancurkan Dunia dengan Senjata Nuklir* (Jakarta: Navila Idea), 23-25.

merupakan negara yang sangat tidak setuju upaya pengembangan nuklir yang dilakukan Iran bahkan Amerika Serikat secara tegas menentang kelanjutan proses pengembangan nuklir Iran. Berbagai macam cara dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan teknologi nuklir Iran. Amerika Serikat memanfaatkan IAEA untuk menjalankan niatnya untuk menghentikan nuklir Iran. Terbukti Amerika Serikat telah mendorong IAEA untuk melakukan *scanning monitoring* dengan melakukan skema terhadap instalasi nuklir Iran menjadi pengembangan senjata nuklir.<sup>6</sup> Usaha Iran agar mendapatkan persetujuan pengembangan nuklir tidak hanya melalui IAEA saja, akan tetapi juga kepada negara-negara anggota IAEA.

Iran merupakan salah satu negara yang cukup lama dalam mengembangkan energi nuklir. Usaha pengembangan nuklir Iran dimulai pada masa pemerintahan Shah Pahlevi. Pada masa pemerintahan Shah Pahlevi tersebut mulai dilakukan penelitian dan pengembangan nuklir di Iran dengan bantuan Amerika Serikat. Shah Pahlevi membeli reaktor riset yang memiliki daya sebesar 5 watt dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Usaha yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai berhasil oleh pemerintahan Shah Pahlevi sehingga pada tahun 1972 dia sangat tertarik dan semangat untuk terus meningkatkan usaha pengembangan nuklir. Hasil dari usaha tersebut adalah dengan didirikannya *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI) pada tahun 1974.<sup>7</sup> Proses pengembangan nuklir Iran dilakukan di Universitas Teheran yang langsung berada di bawah pengawasan Shah Pahlevi.

Pada tahun 1968, Shah Pahlevi menandatangani Traktat non-proliferasi (NPT) dan diratifikasi pada tahun 1970.<sup>8</sup> Isi traktat tersebut sesuai dengan yang disepakati oleh negara pengembang nuklir yaitu adanya hak bagi negara Iran untuk mengembangkan penelitian,

---

<sup>6</sup> Ahmad Jamaan, "Politik Hukum Internasional Dalam Konflik Nuklir Iran-AS", *Jurnal Sosial Politika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, Vol. 14, No. 1 Juli (2007), 31.

<sup>7</sup> Saira Khan, *Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict and Proliferation* (New York: Routledge, 2010), 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 12.

memproduksi, dan menggunakan nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi. Roda pemerintahan pada masa Shah Pahlevi lebih cenderung pro terhadap barat. Sehingga laju perkembangan energi nuklir Iran berjalan dengan cukup pesat.

Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini menjadi penyebab utama berakhirnya kerja sama antara Amerika Serikat dan Iran.<sup>9</sup> Revolusi Iran juga membuat hubungan antara Iran dan beberapa negara lain merenggang. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakpercayaan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap pengembangan nuklir Iran, sehingga Amerika Serikat memutus pasokan uranium kepada pusat penelitian Teheran.<sup>10</sup> Iran menjadi fokus Amerika Serikat di Timur Tengah pascaberakhirnya pemerintahan Shah Pahlevi pada tahun 1979. Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Khomeini tersebut akan menghalangi kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Revolusi Islam Iran merupakan awal lepasnya Republik Islam Iran dari kontrol Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.<sup>11</sup>

Pengembangan nuklir Iran pascarevolusi 1979 sempat terhenti, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh CIA pada tahun 1988 mengatakan bahwa Iran menghentikan program nuklirnya pada tahun 1979 saat terjadinya Revolusi Iran.<sup>12</sup> Pada tahun 1984 pemerintah Iran melanjutkan pengembangan nuklir yang sempat terbengkalai sejak revolusi Iran. Ketika itu Iran telah memiliki sebanyak 5 reaktor penelitian nuklir dan akan menambah hingga 15 reaktor lagi. Iran berhasil menandatangani kerjasama nuklir jangka panjang dengan Pakistan pada tahun 1987 dan Cina pada 1990.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Greg Bruno, "Iran's Nuclear Program", CFR, 2010, <http://www.cfr.org/iran/irans-nuclear-program/p16811> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2016).

<sup>10</sup> Mustafa Kibaroglu, "Good For the Shah, Banned for the Mullahs: The West and Iran's Quest for Nuclear Power", *Middle East Journal*, Volume 60, No. 2 (Spring 2006), 208.

<sup>11</sup> Enayatullah Yazdani dan Rizwan Hussain, *United States' Policy Towards Iran after the Islamic Revolution: An Iranian Perspective* (London: Sage Publications, 2006).

<sup>12</sup> *Middle East-South Asia: Nuclear Handbook*, Central Intelligence Agency, May 1988. Dalam Paul K Kerr. *Iran's Nuclear Program: Status*. <http://www.fas.org/spp/crs/nuke/RL34544.pdf> (Diakses pada 03 Januari 2016).

<sup>13</sup> Muhammad Awan, 129-130.

Program nuklir Iran menjadi isu kontroversial dalam politik internasional sejak Agustus 2002, yaitu ketika ditemukannya pembangunan fasilitas pengayaan uranium rahasia Iran di Natanz. Mengetahui hal itu Amerika Serikat menyatakan bahwa Iran memiliki rencana rahasia dalam memanfaatkan kemampuan nuklirnya untuk mengembangkan senjata nuklir.<sup>14</sup>

Program pengembangan nuklir Iran ditentang oleh negara-negara besar di dunia yang dipromotori oleh Amerika Serikat dan Israel.<sup>15</sup> Program nuklir Iran merupakan ancaman bagi Israel yang merupakan satu-satunya negara non-muslim di kawasan Timur Tengah. Israel akan semakin terancam posisinya jika ada negara lain yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar, apalagi jika memiliki potensi tenaga nuklir. Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam jika posisi sekutunya, Israel, merasa terancam dengan keberadaan nuklir Iran. Amerika Serikat menuduh bahwa Iran telah melanggar Artikel II traktat NPT.<sup>16</sup> Iran sebagai negara *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS) diduga melakukan pengembangan senjata nuklir, sementara itu berdasarkan Artikel II traktat NPT NNWS dilarang untuk mengembangkan senjata nuklir. Oleh karena itu Amerika Serikat berupaya menggunakan pengaruhnya di perpolitikan internasional yang menginginkan nuklir Iran menjadi salah satu agenda utama bagi Ketua IAEA yang nantinya dilaporkan kepada PBB agar dijatuhkan hukuman atas pelanggaran traktat NPT tersebut.

Pada bulan September 2003, *International Atomic Energy Agency* atau biasa disebut IAEA yang dipimpin oleh Mohamad El Baradei melakukan kunjungan ke Iran untuk meninjau langsung program nuklir Iran. Dalam kunjungan tersebut, IAEA menyatakan bahwa Iran

---

<sup>14</sup> Kibaroglu, 207.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 207

<sup>16</sup> Artikel II traktat NPT berbunyi: "Setiap NNWS di bawah kendali traktat dilarang untuk menerima peredaran senjata nuklir atau bahan peledak nuklir dari pengedar manapun; atau dari NWS baik secara langsung maupun tidak langsung. NNWS dilarang untuk mengembangkan atau menerima senjata nuklir atau bahan peledak nuklir. NNWS juga dilarang untuk mencari atau menerima bantuan dalam rangka mengembangkan senjata nuklir atau bahan peledak nuklir.

dianggap gagal dalam melaksanakan perjanjian keamanan terkait program nuklir yang mereka miliki. Kegagalan tersebut terkait dengan beberapa hal yaitu menyembunyikan informasi terkait dengan desain bangunan dan konstruksi fasilitas milik Iran yang baru dibangun dan tidak adanya laporan terkait dengan pengolahan dan impor uranium ke IAEA.<sup>17</sup> Iran mengakui bahwa ada kesalahan dalam pelaporan beberapa progress program nuklir kepada IAEA.<sup>18</sup> Oleh karena itu pemerintah Iran akan melaporkan semua aktivitas nuklir Iran secara transparan kepada IAEA.

Pemerintahan Ahmadinejad menjadi fase baru dalam pengembangan nuklir Iran. Kurang maksimalnya program nuklir masa pemerintahan Khatami membuat Ahmadinejad melanjutkan pengembangan nuklir Iran. Dalam pidato kenegaraannya pada 9 April 2006, Ahmadinejad mengatakan bahwa program pengembangan nuklir Iran kembali diaktifkan semenjak vakum dari masa pemerintahan Presiden Muhammad Khatami.<sup>19</sup> Keinginan Ahmadinejad ini juga didukung oleh pasang surutnya perekonomian global, sehingga setiap negara berusaha untuk mengembangkan energi terbarukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestiknya. Perkembangan teknologi nuklir merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk Iran.

Ahmadinejad sangat berambisi untuk meningkatkan kemampuan negaranya di antara negara-negara di dunia melalui teknologi nuklir. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi faktor utama penentu keberhasilan program nuklir Iran tersebut. Ahmadinejad sendiri tidak menutup diri untuk melakukan kerja sama dengan negara lain.

---

<sup>17</sup> Mohammad Ali Mousavi dan Yasser Norouzi, *Iran-US Nuclear Standoff: A Game Theory Approach*, *Iranian Review of Foreign Affairs*, 1 (1), 2010, 124.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 210.

<sup>19</sup> Alfian Hamzah dan Musa Kazhim, *Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran: Skenario Penghabisan* (Jakarta: Cahaya Insani Suci, 2007), 159.

Ahmandinejad mengatakan bahwa dia akan selalu mengulurkan tangan kepada semua orang, dan dia akan tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan pihak manapun kecuali Israel.<sup>20</sup>

Amerika Serikat dan sekutunya semakin khawatir dengan program pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Kekhawatiran tersebut semakin memuncak dengan melancarkan kecaman kepada Iran. Kecaman tersebut bermula ketika adanya kecurigaan bahwa alasan pengembangan nuklir Iran sebagai upaya untuk menutupi program pengembangan senjata nuklir.<sup>21</sup> Amerika Serikat beserta sekutunya Israel mengklaim bahwa kebutuhan Iran terhadap teknologi nuklir tidak terlalu banyak. Sehingga Iran tidak perlu melakukan program pengayaan nuklir.

Kekhawatiran Amerika Serikat beserta sekutunya terlihat ketika membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang terdiri dari anggota tetap dan lebih dari sebagiannya merupakan negara-negara yang sangat mengecam pengembangan nuklir Iran, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Pengembangan nuklir Iran pada dasarnya sudah lama menjadi salah satu agenda utama bagi IAEA, akan tetapi posisi IAEA yang tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Dewan Keamanan sehingga IAEA tidak bisa menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Berkat desakan Amerika Serikat dan sekutunya, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran melalui beberapa resolusi, di antaranya resolusi 1737 (memberlakukan sanksi ekonomi dan komersial berupa pembekuan terhadap 10 entitas penting terkait dengan program nuklir dan balistik) tahun 2006, resolusi 1747 (membekukan aset 13 entitas baru yang terkait dengan program nuklir atau Pengawal Revolusi Iran. Ada juga sanksi embargo pembelian senjata dan

---

<sup>20</sup> Adel El-Gogary, (2007), *Ahmadinejad : The Nuclear Savior of Tehran*, Pustaka Iman, Depok. Global Security, (2011), "Bushehr", <http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/bushehr.htm>, (Diakses pada 16 Februari 2016).

<sup>21</sup> Smith Alhadar. 2007. "Nuklir Iran dan Motif Penolakan Amerika". [http://unisosedem.org/article\\_detail.php?aid=9041&coid=1&caid=27&gid=3](http://unisosedem.org/article_detail.php?aid=9041&coid=1&caid=27&gid=3) . (Diakses pada tanggal 2 Februari 2016).

pembatasan pinjaman ke Iran) tahun 2007, resolusi 1803 (larangan entitas dan individu dengan membekukan aset dan larangan perjalanan) tahun 2008, dan resolusi 1929 (menempatkan pembatasan baru pada investasi Iran dan melarang penjualan ke Iran dari senjata berat tertentu (tank, pesawat tempur, dan helikopter) tahun 2010.<sup>22</sup>

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB membuat perekonomian Iran mengalami inflasi, namun dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya Iran mampu mengatasi kondisi tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, nilai ekspor Iran pada tahun 2004 tercatat US\$ 42,45 miliar, meningkat dua kali lipat pada tahun 2007 menembus angka US\$ 83 miliar.<sup>23</sup> Meskipun demikian Iran tetap berusaha untuk meyakinkan dunia internasional bahwa program nuklir mereka untuk tujuan damai bukan untuk pembuatan senjata nuklir.

Pada tahun 2009, Iran melakukan pendekatan kepada IAEA yaitu dengan melayangkan surat yang berisi informasi bahwa Iran berkeinginan untuk meningkatkan pengayaan uranium hingga 5%. Hingga tahun 2010 Iran tidak berhenti untuk memperjuangkan hak pengembangan nuklirnya. Terbukti bahwa Iran terus melakukan pendekatan pada negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ahmadinejad dalam pidatonya di sidang umum PBB menyatakan bahwa nuklir Iran untuk kepentingan sipil. Dia juga mengatakan bahwa Iran bersedia melakukan pembicaraan secara damai dengan negara-negara kelompok Wina dan 5+1 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Perancis, Rusia dan Jerman. Hal tersebut juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi, di New York,

---

<sup>22</sup> Pan M. Faiz. “Krisis Nuklir Iran: Perspektif Hukum dan Geopolitik”, 2007. Dalam <http://panmohamadfaiz.com/2007/01/07/krisis-nuklir-iran/>. (Diakses pada tanggal 2 Februari 2016).

<sup>23</sup> Iran Indonesian Radio, (2010), “Mencermati Kemajuan Perekonomian Iran”, [http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&view=article&id=21577:mencermati-kemajuan-perekonomian-iran&catid=59:perspektif&Itemid=101](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=21577:mencermati-kemajuan-perekonomian-iran&catid=59:perspektif&Itemid=101), (Diakses pada tanggal 12 Februari 2016).

“Pembicaraan tersebut akan berhasil jika mereka adil dan mengerti akan hak Iran dalam kepemilikan nuklir untuk tujuan damai dan ketersediaan energi.<sup>24</sup>

Ahmadinejad yang digantikan oleh Hassan Rouhani pada tahun 2013 berusaha agar Iran mendapatkan persetujuan pemanfaatan energi nuklir. Untuk mendapatkan persetujuan nuklir, Iran melakukan diplomasi dengan IAEA dan negara-negara anggota IAEA, terutama dengan negara anggota Dewan Keamanan PBB. Iran berusaha memperoleh haknya untuk mengembangkan nuklir, awal keberhasilan diplomasi Iran adalah ketika juru runding Iran membuktikan bahwa program nuklir Iran bertujuan untuk damai dan menyatakan bahwa Teheran tidak memiliki ambisi untuk memproduksi senjata nuklir.<sup>25</sup> Keberhasilan Iran bermula dari kesepakatan Jenewa pada tanggal 24 November 2013. Keberhasilan Jenewa berhasil menghapuskan sanksi internasional di bidang ekonomi, politik dan hukum terhadap Iran. Namun pengembangan nuklir Iran belum mencapai sebuah kesepakatan bersama dan akan dibahas pada pertemuan di Wina.

Pertemuan di Wina menghasilkan kesepakatan Wina merupakan hasil akhir dari perjuangan diplomasi Iran. Kesepakatan tersebut berhasil dicapai pada tanggal 14 Juli 2015 yang berlangsung antara Iran dengan negara 5+1 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia, Perancis dan Jerman.<sup>26</sup> Kesepakatan Wina menghasilkan kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (*Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA*) yaitu pengakuan kekuatan-kekuatan dunia terhadap hak-hak nuklir bangsa Iran.<sup>27</sup> Berdasarkan kesepakatan Wina semua instalasi

---

<sup>24</sup> BUMN Watch, “Obama dan Ahmadinejad Berhadapan Langsung di MU PBB”, 2010, <http://bumnwatch.com/obama-dan-ahmadinejad-berhadapan-langsung-di-mu-pbb/> (Diakses pada tanggal 16 Februari 2016).

<sup>25</sup> Irib, “Prestasi Diplomasi Nuklir Iran (2)”, 2015 <http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/98239-prestasi-diplomasi-nuklir-iran-2> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2016).

<sup>26</sup> Irib, “Prestasi Diplomasi Nuklir Iran”, 2015. <http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/98106-prestasi-diplomasi-nuklir-iran> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2016).

<sup>27</sup> Irib, “Prestasi Diplomasi Nuklir Iran (3)”, 2015. <http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/98473-prestasi-diplomasi-nuklir-iran-3> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2016).

nuklir Iran tidak ada yang dihentikan aktivitasnya. Semua aktivitas instalasi nuklir Iran tetap berlanjut, termasuk di daerah Natanz dan Fordow. JCPOA menjamin kelanjutan program pengayaan Uranium di Iran. Pemerintahan Hassan Rouhani berhasil melanjutkan perjuangan diplomasi nuklir Iran yang telah dilakukan sejak masa pemerintahan Ahmadinejad.

Berangkat dari dinamika perjuangan pemerintah Iran dalam meyakinkan dunia internasional untuk pengembangan nuklirnya, serta tuduhan dan desakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui IAEA untuk menghentikan pengembangan yang dilakukan, peneliti tertarik untuk melihat diplomasi yang dilakukan Iran kepada IAEA untuk mendapatkan persetujuan dalam pemanfaatan energi nuklir.

## 1.2. Rumusan Masalah

Usaha pemerintah Iran dalam meyakinkan dunia internasional tentang program nuklir mereka yang bertujuan untuk damai sudah dilakukan semenjak pemerintahan Ahmadinejad. Pada periode kedua pemerintahan Ahmadinejad tahun 2009 Iran melakukan pendekatan dengan IAEA, yaitu melakukan transparansi terhadap program nuklir mereka. Usaha pemerintahan Ahmadinejad tidak hanya pada level IAEA saja, Iran juga berusaha melakukan pembicaraan dengan negara-negara anggota IAEA di antaranya negara 5+1. Amerika Serikat sebagai negara *super power* tetap tidak percaya dan selalu menuduh program nuklir Iran bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Namun sebagai negara yang berdaulat, Iran terus memperjuangkan haknya untuk pengembangan nuklir.

Pergantian kepemimpinan Iran tidak mengubah perhatian kepada nuklir, Hassan Rouhani yang terpilih menggantikan Ahmadinejad pada tahun 2013 melanjutkan upaya nuklir Iran. Upaya tersebut berujung dengan tercapainya kesepakatan Wina pada tahun 2015 yaitu antara Iran

dengan Negara 5+1. Keberhasilan Iran meyakinkan dunia internasional melalui IAEA menjadi penting untuk diteliti, melihat bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Sebagaimana yang telah diutarakan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini yaitu: Mengapa Iran dianggap berhasil dalam melakukan diplomasi multilateral terhadap IAEA terkait pengembangan energi nuklir periode 2009-2015?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

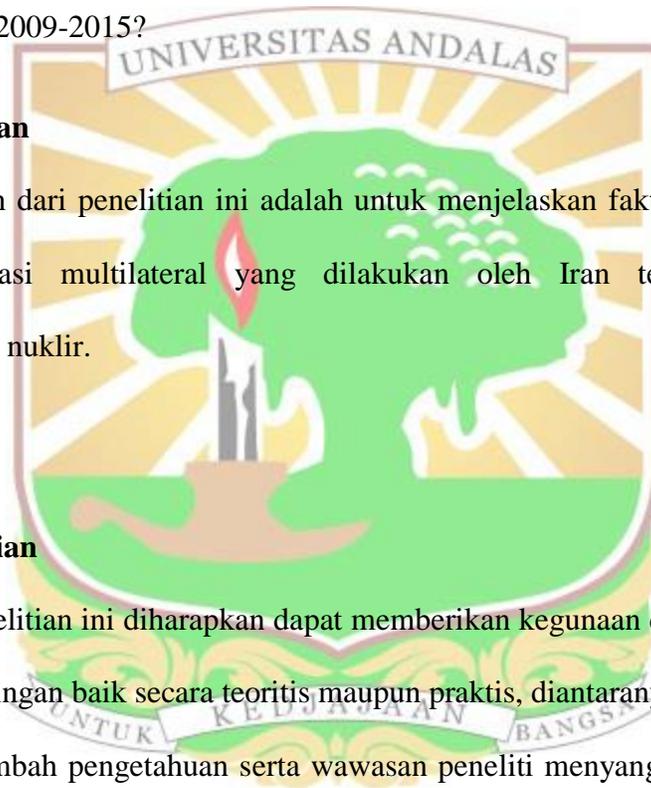
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan diplomasi multilateral yang dilakukan oleh Iran terhadap IAEA terkait pengembangan energi nuklir.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan peneliti menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi bagi perbendaharaan ilmu pengetahuan dan kepustakaan, terutama peristiwa yang berhubungan dengan konteks Hubungan Internasional.

### **1.6. Studi Pustaka**



Dalam menganalisis persoalan yang diangkatkan, penulis mencoba untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan pijakan bagi penulis. Berikut beberapa tulisan yang terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Pertama adalah buku yang ditulis oleh Saira Khan dengan judul *Iran and Nuclear Weapons, Protracted and Proliferation*.<sup>28</sup> Dalam tulisan tersebut Saira Khan memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan nuklir Iran yang sudah mulai berlangsung semenjak 1960an di bawah pemerintahan Shah Pahlevi. Dalam sejarah perkembangan nuklir Iran, negara barat seperti Amerika Serikat memiliki peranan yang sangat signifikan karena secara langsung membantu pemerintahan Shah Pahlevi dalam upaya pengembangan potensi nuklir yang dimiliki Iran. Puncak kedekatan Iran dengan Amerika Serikat berakhir setelah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979 diikuti dengan turunnya Shah Pahlevi dari jabatan sebagai presiden Iran.

Setelah revolusi Islam Iran pemerintahan Iran tidak lagi pro kepada barat, ketika itu di bawah pemerintahan Khomeini yang lebih fokus pada pengembangan Islam di Iran. Pengembangan nuklir kembali muncul dan dikembangkan pada masa pemerintahan Ahmadinejad yang terpilih menjadi presiden Iran pada tahun 2005. Iran sebagai salah satu negara kunci yang ada di Timur Tengah mengatakan bahwa program nuklir yang mereka kembangkan bertujuan untuk damai. Keseriusan Iran dalam meyakinkan dunia internasional ditandai dengan memberikan ruang bagi IAEA untuk melakukan inspeksi terhadap program pengayaan nuklir Iran selama 18 bulan. Ahmadinejad yang berposisi sebagai presiden Iran saat itu dengan tegas mengatakan bahwa program nuklir Iran untuk keperluan sipil bukan untuk pembuatan senjata nuklir. Meskipun Ahmadinejad menyatakan tujuan pengembangan nuklir Iran untuk damai, namun tetap ada kecemasan dunia internasional terhadap pengembangan nuklir Iran tersebut

---

<sup>28</sup> Saira Khan, *Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict and Proliferation* (New York: Routledge, 2010).

terutama Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Kajian pustaka ini dapat menjadi rujukan bagi penulis mengenai ambisi pengembangan nuklir Iran serta tuduhan Amerika Serikat dan sekutunya.

Kajian pustaka selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Robiat Pahlevie dengan judul “Peranan Mahmoud Ahmadinejad Dalam Mengembangkan Iran Menjadi Kekuatan Besar Di Kawasan Timur Tengah”.<sup>29</sup> Robiat Pahlevi dalam tulisannya menyatakan bahwa terdapat perubahan-perubahan pada masa pemerintahan Ahmadinejad seperti proses demokrasi yang terhambat, pudarnya dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan Amerika Latin dan ketergantungan terhadap energi yang makin besar, dan juga semakin meluasnya dukungan dan kerjasama dalam berbagai bidang di kawasan Timur Tengah bahkan negara-negara lain di dunia yang menjadikan Iran memiliki posisi tawar yang tinggi dalam sistem internasional.

Kondisi domestik di Negara Iran baik pada masa pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad maupun pemerintahan sebelumnya juga menunjukkan kesadaran demokrasi masyarakat Iran yang tinggi. Dalam isu nuklir Iran ini pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad melakukan sosialisasi besar-besaran mengenai pentingnya pengembangan teknologi nuklir sebagai sumber energi yang efektif dan efisien yang bermanfaat bagi bangsa Iran. Sentimen nasionalisme dan keislaman sangat dikait-kaitkan dalam hal ini. Dalam prosesnya banyak ditentang oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan menjaga perdamaian dunia seperti Amerika Serikat, PBB, dan IAEA. Namun semakin besar penentangan yang diberikan kepada pemerintahan Ahmadinejad mengenai isu nuklir ini malah memunculkan sebuah kekompakan nasional dimana mayoritas rakyat Iran mendukung penuh kebijakan Ahmadinejad mengenai program nuklir damai.

---

<sup>29</sup> Robiat Fahlevie, “Peranan Mahmoud Ahmadinejad Dalam Mengembangkan Iran Menjadi Kekuatan Besar Di Kawasan Timur Tengah”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, FISIP Unmul, no. 1 (2013).

Kemampuan diplomasi Ahmadinejad mengubah Iran menjadi salah satu negara terkuat di Timur Tengah. Dimana masalah nuklir menjadi fokus utama dalam diplomasi Iran. Namun, kebijakan politik luar negeri Iran ini berhasil mengubah masalah ini menjadi simbol perjuangan rakyat Iran menentang hegemoni Barat. Selain itu juga pemerintah Ahmadinejad aktif mengadakan kunjungan diplomasi ke luar negeri guna mencari dukungan dan mensosialisasikan bahwa program nuklir yang dicanangkan oleh pemerintah Iran itu bertujuan damai.

Kajian pustaka selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Mustafa Kibaroglu dengan judul “*Good for the Shah, Banned for the Mullahs; The West and Iran’s Quest for Nuclear Power*”.<sup>30</sup>

Dalam tulisannya Kibaroglu menjelaskan bagaimana perkembangan nuklir Iran sejak sebelum revolusi Iran pada tahun 1979 sampai setelah revolusi tersebut berlangsung. Dimana pemerintahan Iran berada di bawah kepemimpinan Khomeini yang bertindak sebagai penggerak pada revolusi Iran tahun 1979. Perkembangan nuklir Iran terus dikembangkan oleh pemerintah, meskipun kurang maksimal pengembangannya, nuklir Iran selalu menjadi perhatian bagi Barat yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Pada tahun 2002 isu nuklir Iran kembali muncul setelah ditemukan bahwa Iran memiliki sebuah fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Hal tersebut secara spontan membuat perhatian Barat menjadi fokus kepada nuklir Iran. Berbagai macam upaya terus dilakukan agar bisa menghentikan program nuklir Iran tersebut, bahkan pengembangan nuklir Iran dikatakan untuk pembuatan senjata nuklir dan melanggar traktat NPT. Amerika Serikat melalui IAEA dan PBB terus mendesak Iran untuk melanjutkan niatnya. Di sisi lain pemerintah Iran terus berupaya untuk meyakinkan dunia internasional bahwa nuklir mereka bertujuan untuk damai.

---

<sup>30</sup> Mustafa Kibaroglu, “Good For the Shah, Banned for the Mullahs: The West and Iran’s Quest for Nuclear Power”, *Middle East Journal*, Volume 60, No. 2 (Spring, 2006).

Kajian pustaka selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabil dengan judul “Multilateral diplomasi *Six Party Talks* Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009”.<sup>31</sup> Dalam tulisannya Muhammad Nabil mencoba melihat bagaimana upaya diplomasi multilateral yang dilakukan oleh *Six Party Talks* dalam mewujudkan denuklirisasi di Korea Utara periode 2003-2009. Perlunya upaya denuklirisasi di Korea Utara karena pengembangan nuklir Korea Utara mengundang kritik dari berbagai negara dan dianggap mengancam keamanan kawasan. Hadirnya *Six Party Talks* bertujuan untuk menyelesaikan isu nuklir Korea Utara dan menghentikan nuklir yang dikembangkan Korea Utara. Usaha tersebut belum berhasil, namun *Six Party Talks* berupaya agar tercapainya sebuah kesepakatan bersama. Meskipun kesepakatan sudah berhasil dicapai, akan tetapi belum mampu diimplementasikan. Lebih lanjut lagi Nabil menemukan bahwa *Six Party Talks* mampu menjadi sarana diplomasi dan negosiasi, mendorong proses pembongkaran program nuklir Korea Utara, menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan Semenanjung Korea dan Asia Timur. Meskipun yang dianalisis adalah Korea Utara, tulisan ini berguna bagi peneliti untuk melihat dinamika diplomasi multilateral yang terjadi di dalamnya.

Kajian pustaka terakhir yang penulis gunakan adalah skripsi yang ditulis oleh Ragil Wibisono dengan judul “Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010”.<sup>32</sup> Dalam tulisannya Ragil Wibisono mencoba untuk menggambarkan bagaimana respon Amerika Serikat terhadap pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh Iran. Amerika Serikat khawatir jika pengembangan nuklir Iran akan menjadi penghalang terhadap terhadap kepentingannya di Timur Tengah. Pengembangan nuklir Iran juga

---

<sup>31</sup> Muhammad Nabil, “Multilateral diplomasi *Six Party Talks* Dalam Proses Denuklirisasi Kore Utara Periode 2003-2009” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

<sup>32</sup> Ragil Wibisono, “Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

dikhawatirkan bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir dan berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Sebagai bukti bahwa tujuan nuklirnya untuk damai, Iran bersedia diawasi oleh IAEA dan menandatangani traktat NPT tambahan.

Amerika Serikat dan sekutunya tetap berupaya untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran. Alasan lain penghentian nuklir Iran yang diinginkan oleh Amerika Serikat adalah perlindungan terhadap Israel yang juga menjadi alasan mengapa Amerika Serikat merespon pengembangan nuklir Iran. Amerika Serikat meyakini bahwa nuklir Iran berpotensi mengancam kedaulatan Israel di Timur Tengah.

## 1.7. Kerangka Konseptual

### 1.7.1. Diplomasi

Kata diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani yaitu *diploun* yang berarti *melipat*. Menurut Nicholson, pada masa kekaisaran Romawi semua paspor yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan ini disebut *diplomas*. Selanjutnya inilah yang berkembang dan menyangkut dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing yang di luar bangsa Romawi. Isi surat resmi negara ini dikumpulkan, disimpan menjadi arsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal pada jaman pertengahan sebagai *diplomaticus* atau *diplomatique*.<sup>33</sup>

Para pakar memberikan pengertian yang berbeda terhadap kata diplomasi. Menurut *The Oxford English Dictionary*, diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat. Sir Ernest Satow dalam karyanya yang berjudul *A Guide to Diplomatic*

---

<sup>33</sup> Harold Nicholson, *Diplomacy*, (London: Oxford University Press, 1942), 13-15.

*Practice* mendefinisikan diplomasi sebagai berikut “*Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relation between the governments of independent states*”,<sup>34</sup> dengan artian bahwa diplomasi sebagai aplikasi intelligen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang bisa saja diperluas dengan hubungan dengan negara jajahannya. Pakar lain yang juga memberikan pandangan tentang diplomasi adalah Barston, menurutnya diplomasi adalah manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.<sup>35</sup> Tujuan utama dari diplomasi adalah memajukan kepentingan nasional melalui sarana perdamaian.<sup>36</sup> Secara khususnya diplomasi bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku lawan dari sebuah negara.<sup>37</sup>

Untuk mencapai tujuan-tujuan utama tersebut harus menggunakan cara-cara yang tepat. Cara-cara dalam diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan itu terdapat tiga macam, yaitu persuasi, kompromi dan ancaman kekuatan senjata atau militer. Kolaborasi dari tiga hal ini yang tidak bisa dipisahkan dari pencapaian tujuan yang dimaksud, yaitu dengan menggunakan metode persuasi bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari kompromi dan memberikan kesan pihak lawan kekuatan militer yang dimiliki.<sup>38</sup> Cara-cara persuasi merupakan cara-cara meyakinkan dan membujuk serta mengajak secara lunak dan tanpa ada unsur kekerasan dengan memberikan

---

<sup>34</sup> Sir Ernest Satow, 1961, *A Guide to Diplomatic Practice*, Edited by Sir Neville Bland, Longman dalam Suwardi Wiriartmajda, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1967), 164.

<sup>35</sup> R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, N.Y: Longman dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, *Diplomasi Antara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1997), 4.

<sup>36</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), 296.

<sup>37</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 14.

<sup>38</sup> *Ibid.*

alasan dan prospek baik yang meyakinkan agar sikap, tindakan dan kebijakan negara lain terpengaruh dan berubah.<sup>39</sup> Sedangkan cara-cara kompromi adalah cara penyelesaian dalam suatu perselisihan dengan jalan persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara mengorbankan sebagian dari tuntutan masing-masing, ataupun tawar menawar, bekerja sama dan kongkalikong.<sup>40</sup> Sedangkan cara diplomasi yang terakhir adalah ancaman, merupakan cara mempengaruhi negara lain melalui kekerasan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai hal dan bidang.

Sukawarsisni Djelantik juga memandang bahwa diplomasi pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk mengubah kebijakan, tindakan tujuan, dan sikap pemerintah negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi atau mengirimkan ancaman.<sup>41</sup>

Diplomasi yang digunakan bisa berupa diplomasi bilateral dan multilateral, tergantung kondisi dan situasi yang dialami oleh sebuah negara. Menurut Partanto,<sup>42</sup> diplomasi bilateral merupakan hubungan dua pihak di mana keduanya saling bertemu untuk membicarakan suatu hal dengan tujuan melakukan kerja sama, penempatan duta besar, mengadakan perjanjian atau hanya sekedar melakukan kunjungan kenegaraan. Adapun diplomasi multilateral adalah melakukan diplomasi dengan negara-negara lain yang cakupannya lebih luas dikarenakan diplomasi ini dilakukan oleh banyak pihak.

### 1.7.2. Diplomasi Multilateral

---

<sup>39</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), 388.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 257

<sup>41</sup> Sukawarsisni Djelantik, *Op-cit*, 4.

<sup>42</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994).

Sebagaimana juga sudah dibahas di atas bahwa diplomasi berdasarkan kepada aktornya terbagi dua, yaitu diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Dalam penelitian ini terjadi diplomasi multilateral yang melibatkan banyak negara. Diplomasi multilateral dapat didefinisikan sebagai negosiasi dan diskusi yang memungkinkan tindakan kolektif dan kerja sama antarnegara ataupun aktor non-negara.<sup>43</sup>

Pada dasarnya diplomasi multilateral merupakan diplomasi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Diplomasi multilateral dinilai berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral.<sup>44</sup> Poin ini mengandung dua aspek, yaitu pertama diplomasi multilateral memberi kesempatan untuk membahas masalah-masalah di luar agenda formal dan yang menjadi perhatian bersama. Kedua mediator yang memiliki kekuasaan penuh dapat menyelenggarakan konferensi multilateral sebagai upaya memulai negosiasi bilateral untuk membahas masalah mendasar yang sebelumnya diselenggarakan di tempat lain.

Iran sebagai sebuah negara yang berdaulat memperjuangkan hak pengembangan nuklir domestiknya. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah Iran melakukan diplomasi dengan IAEA dan negara anggota IAEA terutama negara 5+1. Diplomasi yang digunakan Iran adalah diplomasi multilateral.

Ronald A. Walker mengemukakan tentang tujuan-tujuan dari diplomasi multilateral seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.<sup>45</sup>

Tabel 1.1 Tujuan-tujuan diplomasi multilateral

No	Tujuan	Definisi
----	--------	----------

<sup>43</sup> Langhorne. "The Unique Challenges Presented by Multilateral Diplomacy", *Social Science Research Network*, 2012.

<sup>44</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 142.

<sup>45</sup> Ronald A. Walker, *Multilateral Conference: Purposeful International Negotiation* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 16-20.

1	Pengumpulan dan penyatuan informasi	Tujuan utama dari interaksi antarpemerintah satu sama lainnya adalah untuk mempermudah dalam akses informasi. Melalui diplomasi multilateral proses penyebaran informasi akan semakin mudah untuk diperoleh.
2	Proyek Bersama	Proyek bersama merupakan salah satu langkah yang efektif bagi negara untuk mencapai tujuan bersama
3	Mengelola lingkungan eksternal	Diplomasi multilateral bisa mempengaruhi lingkungan regional dan global karena akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif
4	Mempengaruhi perilaku	Negara dengan kedaulatan yang dimilikinya memiliki kemampuan untuk membuat suatu kebijakan sendiri. Melalui diplomasi multilateral adanya upaya bagi suatu negara untuk mempengaruhi kebijakan negara lain
5	Kesepakatan yang saling menguntungkan	Tujuan selanjutnya adalah adanya manfaat bersama bagi negara atau pihak yang melakukan diplomasi multilateral. Dengan artian bahwa manfaat tidak hanya diperoleh oleh suatu pihak saja, akan tetapi pihak yang juga memperoleh manfaat dari kesepakatan yang dilakukan.
6	Agenda Domestik	Agenda domestik merupakan salah satu alasan dan tujuan bagi negara untuk melakukan diplomasi multilateral, karena hubungan internasional tidak terlepas dari domestik begitu juga sebaliknya.

Menurut Ronald A. Walker terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan diplomasi multilateral bagi sebuah negara yang melakukan diplomasi yaitu:<sup>46</sup>

#### 1. Informasi

Diplomasi multilateral merupakan mekanisme paling efektif dalam penyebaran informasi. Informasi adalah cara yang paling menentukan bagi seseorang untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan, termasuk orang-orang yang ada dalam

<sup>46</sup> *Ibid.*, 3-4.

pemerintahan. Informasi yang dimaksud adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk memberitahu publik atau dunia internasional.

## 2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral adalah komitmen timbal balik dimana masing-masing pihak berusaha untuk melakukan tindakan tertentu dalam kesepakatan yang telah ditetapkan. Perjanjian multilateral berupa upaya untuk berperilaku sesuai dengan cara yang telah ditetapkan, kontrak dalam diplomasi multilateral adalah usaha timbal balik antara semua pihak dimana masing-masing pihak akan melakukan kewajibannya. Perjanjian internasional merupakan *self-fulfilling* yaitu selama satu pihak melihat adanya manfaat pada pihak lain.

## 3. Negosiasi

Negosiasi merupakan sebuah proses dimana berbagai pihak melakukan interaksi yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pihak lain dalam sebuah pertemuan. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam diplomasi multilateral mempertemukan antara negara dengan negara ataupun dengan organisasi untuk memutuskan suatu permasalahan yang penting.

Secara umum negosiasi diartikan sebagai sebuah proses dimana tawaran secara jelas disampaikan untuk tujuan mencapai kesepakatan tentang pertukaran atau realisasi terhadap kepentingan yang sama dimana konflik kepentingan muncul. Unsur-unsur yang mengawali sebuah negosiasi adalah kepentingan bersama (*common interest*) dan masalah yang dipertentangkan (*issues of conflict*).

## 4. Delegasi

Delegasi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diutus oleh pemerintah untuk mewakili negaranya dalam menyampaikan kepentingan negaranya.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam sebuah diplomasi multilateral melalui dua cara yaitu melalui konsensus dan melalui suara terbanyak (*voting*). Konsensus merupakan kesepakatan yang diambil jika semua pihak menyetujui sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat. Namun apabila konsensus tidak berhasil maka dilanjutkan dengan *voting*. *Voting* merupakan kesepakatan yang diambil melalui suara terbanyak terhadap suatu kesepakatan.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini peneliti mencoba melihat bagaimana diplomasi multilateral yang digunakan oleh pemerintah Iran dalam pengembangan energi nuklirnya, agar mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui IAEA.

## 1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk pendekatan masalah serta menemukan jawaban, dengan kata lain metodologi adalah suatu pendekatan umum yang mengkaji topik penelitian<sup>48</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam sarana. Penelitian kualitatif berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.<sup>49</sup>

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi di mana analisis yang dilakukan dengan menjelaskan hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang sedang diteliti.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., 159-167.

<sup>48</sup> Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2001).

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Paul D. Leedy dan Jeanne E. Ormrod, *Practical Research: Planning and Design Research* (Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2005), 145.

### 1.8.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran kepada IAEA untuk mendapatkan persetujuan pengembangan nuklir periode 2009-2015. Pengambilan tahun 2009-2015 karena pada tahun 2009 merupakan periode kedua pemerintahan Ahmadinejad yang berupaya untuk menyelesaikan persoalan nuklir Iran melalui diplomasi dan tahun 2015 merupakan akhir perjuangan diplomasi nuklir Iran yaitu dengan disepakatinya kesepakatan bersama di Wina, Austria. Meskipun demikian dalam pembahasan selanjutnya masih memungkinkan peneliti untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan dan mendukung pokok permasalahan.

### 1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis. Unit ini merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari unit lain.<sup>51</sup> Unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisa disebut sebagai unit eksplanasi. Unit eksplanasi lebih dahulu terjadi daripada unit analisis. Tingkat analisis merupakan area di mana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisis dalam penelitian ini akan ditekankan.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas, unit analisis penelitian ini adalah Iran. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah tekanan dunia internasional melalui IAEA terhadap pengembangan nuklir Iran. Sedangkan tingkat analisisnya yaitu sistem internasional dimana Iran berupaya agar program nuklirnya diakui dunia internasional melalui IAEA.

### 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>51</sup> Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi" (Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LPE), 108.

<sup>52</sup> Ibid., 35.

Dalam pengumpulan data, teknik yang peneliti gunakan adalah telaah pustaka (*library research*) atau studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku-buku, jurnal, dokumen, majalah dan artikel-artikel, media elektronik serta pencarian informasi melalui internet.<sup>53</sup> Mengingat banyaknya sumber informasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan ini penulis kemudian akan memilih kembali sumber-sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian ini.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis.<sup>54</sup> Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dijabarkan ke dalam unit-unit dan kemudian disusun kedalam pola dan memilih mana yang paling penting dan dapat membantu untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu (1) proses reduksi data, (2) proses penyajian data dan (3) proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui tahapan ini diharapkan peneliti dapat menganalisis permasalahan yang nantinya akan diteliti dalam penelitian ini.

Kerangka analisis yang peneliti gunakan adalah melihat kepada hal yang berpengaruh dalam diplomasi multilateral menurut Ronald A. Walker sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kerangka konseptual di atas, yaitu informasi, perjanjian multilateral, negosiasi dan delegasi.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

---

<sup>53</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 156.

<sup>54</sup> Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research* (State University of Georgia: Georgia), 97.

## **Bab. 1** Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metodologi penelitian. Diharapkan pada bab ini dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan dibahas.

## **Bab. 2** Dinamika Perkembangan Nuklir Iran dan IAEA

Dalam bab ini membahas mengenai dinamika perkembangan nuklir Iran dari waktu ke waktu semenjak nuklir pertama kali dikembangkan pada masa pemerintahan Shah Pahlevi sampai pemerintahan Hasan Rouhani. Dimulai dengan sejarah dan pasang surut perkembangan nuklir Iran, serta sejarah dan pasang surut hubungan Iran dengan IAEA.

## **Bab. 3** Tekanan Dunia Internasional Melalui IAEA terhadap Pengembangan Nuklir Iran: AS dan Sekutunya

Bab ini membahas mengenai aturan-aturan yang ada pada IAEA serta kewenangan yang diberikan IAEA kepada anggota dalam pengembangan nuklir domestinya.

## **Bab. 4** Diplomasi Iran terhadap IAEA untuk mendapatkan persetujuan dalam pemanfaatan energi Nuklir Periode tahun 2009-2015.

Bab ini membahas mengenai upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Iran kepada forum internasional melalui IAEA dan anggota IAEA.

## **Bab. 5** Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan dari seluruh uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.